

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN**
(Studi Empiris pada Perusahaan Peserta *Corporate Governance*
Perception Index (CGPI) Tahun 2012)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

TANGGUH WICAKSONO
NIM. C2C007126

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN**
(Studi Empiris pada Perusahaan Peserta *Corporate Governance*
Perception Index (CGPI) Tahun 2012)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

TANGGUH WICAKSONO
NIM. C2C007126

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Tangguh Wicaksono

Nomor Induk Mahasiswa : C2C007126

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD CORPORATE***
***GOVERNANCE* TERHADAP**
PROFITABILITAS PERUSAHAAN
(Studi Empiris pada Perusahaan Peserta
Corporate Governance Perception Index
(CGPI) Tahun 2012)

Dosen Pembimbing : Dr. H. Raharja, M.Si., Akt.

Semarang, 3 September 2014

Dosen Pembimbing,



(Dr. H. Raharja, M.Si., Akt.)

NIP. 19491114 198001 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Tangguh Wicaksono
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007126
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN**
(Studi Empiris pada Perusahaan Peserta *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* Tahun 2012)

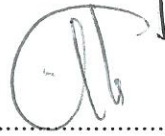
Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 17 September 2014

Penguji :

1. Dr. H. Raharja, M.Si., Akt.

()

2. Prof. Dr. H. Abdurrahman, S.E., M.Si., Akt. ()

3. Drs. H. M. Didik Ardiyanto, M.Si., Akt. ()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Tangguh Wicaksono menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Peserta *Corporate Governance Perception Index (CGPI) Tahun 2012*)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 3 September 2014

Yang membuat pernyataan,

(Tangguh Wicaksono)
NIM. C2C007126

ABSTRACT

In addition, differences in the results of previous studies made with the GCG (Good Corporate Governance) variable profitability of a company pushing for research conducted in accordance with current conditions. Companies that have been proven to pay attention to the organization of the system will tend to have a good system of corporate governance. When it was created, the company can establish a good relationship with stakeholders. Good relationships will lead to high trust from the stakeholders expected to have an impact on increasing the profitability of the company.

The population of this research is companies listed in Corporate Governance Perception Index (CGPI) in 2012, while the sampling method using purposive sampling method. Total observation of this study is 58 companies. Data analysis techniques performed by hypothesis testing using multiple linear regression or OLS (Ordinary Least Square).

The purpose of this study is to determine whether the GCG has a significant effect on the profitability of the company. GCG in this case is proxied with the size of the board of directors, board of commissioner and audit committee. While the profitability variable is proxied by ROE (Return On Equity). Based on the survey results revealed that corporate governance variables do not have significant impact to the profitability of the company.

Keywords: corporate governance, board of directors, board of commissioners and audit committee, profitability of company, ROE

ABSTRAK

GCG (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang sudah terbukti memperhatikan sistem organisasi tersebut akan cenderung memiliki sistem tata kelola yang baik pula. Apabila hal tersebut sudah tercipta maka perusahaan dapat membina hubungan yang baik dengan para *stakeholder*. Hubungan yang baik tersebut akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi dari para stakeholder sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah GCG (*Good Corporate Governance*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. GCG dalam hal ini di proksikan dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan dan komite audit. Sedangkan variabel profitabilitas diproksikan dengan ROE (*Return On Equity*).

Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tahun 2012. Metode pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Sehingga didapat jumlah observasi sebanyak 58 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda atau OLS (Ordinary Least Square).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE dan variabel komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE serta dewan komisaris berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian menunjukkan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Kata kunci : *corporate governance*, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, ROE

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugerah kepada penulis. Tiada daya selain karenaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Peserta *Corporate Governance Perception Index (CGPI) Tahun 2012*)”**. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penelitian ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati ,penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Raharja, M.SI, Akt., selaku dosen pembimbing atas segala kesabaran, arahan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D.
3. Bapak Surya Rahardja, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang sudah banyak membantu dalam konsultasi dan selama perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

4. Kedua orang tua, Ibu (Kasiharningsih) dan Bapak (Martono), yang telah berjuang untuk mendidik dan menyayangi penulis sepanjang hayat.
5. Kakakku Prima Kurnia Sari yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih atas segala bantuannya selama ini.
6. Keluarga Mas Tri Agung, Mbak Mimi, Galus, Teh Nisa, Teh Nadia, Gani, dan Gina yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman – teman FE Undip 2007. Terima kasih untuk semuanya dan semoga kita semua bisa meraih cita-cita dan keinginan kita di masa depan.
8. Semua pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Seluruh kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk penyusunan penelitian selanjutnya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya.

Penulis,

Tangguh Wicaksono

NIM. C2C007126

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	11
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)	11
2.1.2 Teori Stakeholder	14

2.1.3	Good Corporate Governance (GCG)	16
2.1.3.1	Struktur <i>Corporate Governance</i>	19
2.1.3.2	Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	20
2.1.3.3	Ukuran Dewan Direksi	22
2.1.3.4	Ukuran Dewan Komisaris	22
2.1.3.5	Ukuran Komite Audit	23
2.1.4	Profitabilitas	24
2.1.5	Penelitian Terdahulu	25
2.2	Kerangka Pemikiran	35
2.3	Perumusan Hipotesis	36
2.3.1	Hubungan Ukuran Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Perusahaan	36
2.3.2	Hubungan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas	38
2.3.3	Hubungan Ukuran Komite Audit terhadap Profitabilitas Perusahaan	39
BAB III	METODE PENELITIAN.....	41
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel ...	41
3.1.1	Variabel Dependen	42
3.1.2	Variabel Independen	42
3.1.2.1	Ukuran Dewan Direksi	42
3.1.2.2	Ukuran Dewan Komisaris.....	43
3.1.2.3	Ukuran Komite Audit	43

3.2	Populasi dan Sampel	43
3.3	Jenis dan Sumber Data	45
3.4	Metode Pengumpulan Data	45
3.5	Metode Analisis Data	46
3.5.1	Statistik Deskriptif	46
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	46
3.5.2.1	Uji Normalitas	46
3.5.2.2	Uji Multikolonieritas	47
3.5.2.3	Uji Autokolerasi	47
3.5.2.4	Uji Heterokedastisitas	48
3.5.3	Pengujian Hipotesis	49
3.5.3.1	Uji Simultan (Uji Statistik F).....	50
3.5.3.2	Uji Statistik t	50
3.5.3.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	51
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1	Deskriptif Objek Penelitian	52
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	57
4.3	Uji Asumsi Klasik	59
4.3.1	Uji Normalitas	59
4.3.2	Uji Heteroskedastisitas	60
4.3.3	Uji Multikolonieritas	61
4.3.4	Uji Autokolerasi	62
4.4	Analisis Regresi Berganda.....	63

4.4.1 Uji Statistik t...	64
4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	65
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	65
4.5 Uji Hipotesis	66
4.6 Interpretasi Hasil	68
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Keterbatasan Penelitian	72
5.3 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.....	29
Tabel 3.1	44
Tabel 4.1	52
Tabel 4.2	56
Tabel 4.3	58
Tabel 4.4	60
Tabel 4.5	61
Tabel 4.6	62
Tabel 4.7	63
Tabel 4.8	64
Tabel 4.9	65
Tabel 4.10	66
Tabel 4.11	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	20
Gambar 2.2	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Uji Asumsi Klasik.....	76
1. Uji normalitas dengan menggunakan Uji Kolmogorov – Smirnov.....	76
2. Uji Multikolonieritas.....	78
3. Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser.....	80
4. Uji Autokorelasi.....	82
Uji Analisis Regresi.....	83
5. Uji Regresis Linier Berganda.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, dunia usaha semakin dinamis. Perkembangan kemampuan perusahaan menjadi suatu hal yang sangat penting agar dapat bertahan di pasar global. Sehingga tidak heran bahwa kini perusahaan berlomba-lomba meningkatkan daya saingnya di berbagai bidang. Salah satu upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas perusahaan adalah dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). IICG (*The Indonesian Institute For Corporate Governance*) adalah salah satu pihak yang mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia.

IICG didirikan 2 Juni 2000 atas inisiatif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan tokoh masyarakat untuk memasyarakatkan konsep, praktik dan manfaat *Good Corporate Governance* (GCG) kepada dunia usaha khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. IICG merupakan salah satu peran dari masyarakat sipil untuk mendorong terciptanya dunia usaha Indonesia yang terpercaya, etis, dan bermartabat. Sebagai organisasi independen dan nirlaba, IICG berkomitmen mendorong praktik GCG atau tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia dan mendukung serta membantu perusahaan-perusahaan dalam menerapkan konsep Tata Kelola (*Corporate Governance*). Dengan tata kelola

perusahaan yang baik, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta profitabilitas perusahaan.

Kinerja perusahaan yang baik, stabil dan cenderung meningkat akan senantiasa disenangi oleh para investor. Sedangkan perusahaan yang memiliki kinerja buruk, tidak stabil serta profit yang cenderung menurun tidak akan dilirik oleh investor (Nugroho, 2014).

Kinerja perusahaan adalah nilai yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada suatu standar tertentu. Umumnya, kinerja perusahaan digambarkan melalui kondisi keuangan. Sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam suatu periode tertentu. Hal tersebut juga berguna sebagai bahan dasar pengambilan keputusan baik bagi pihak internal maupun eksternal.

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan profitabilitas perusahaan. Peningkatan profitabilitas perusahaan membutuhkan penerapan pengelolaan perusahaan yang baik maka perusahaan perlu mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG telah menjadi isu yang tengah marak akhir-akhir ini. GCG merupakan seperangkat peraturan dalam rangka pengendalian perusahaan untuk menghasilkan *value added* bagi para *stakeholders*.

GCG diharapkan tidak hanya fokus memberikan manfaat bagi manajemen dan karyawan perusahaan, melainkan juga bagi *stakeholders*, konsumen, pemasok, pemerintah, dan lingkungan masyarakat terkait dengan perusahaan tersebut. Selain itu, GCG juga akan mendorong terbentuknya pola kerja

manajemen yang transparan, bersih, dan profesional (Effendi (dikutip oleh Ramdhaningsih dan Utama, 2013)). Pada mulanya, pelaksanaan GCG di Indonesia masih bersifat sukarela sehingga tidak ada sanksi yang diberikan apabila perusahaan tidak melaksanakan *Good Corporate Governance*. Namun, di tahun 2012 GCG wajib diterapkan pada perusahaan BUMN. Untuk perusahaan lain, Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (BAPEPAM-LK) hanya menyediakan kuesioner penilaian sendiri untuk melihat kualitas tata kelola perusahaannya. GCG dapat tercapai apabila perusahaan memenuhi asas-asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran serta kesetaraan.

Pratama (2013) menyebutkan bahwa dalam asas transparansi, perusahaan diwajibkan untuk memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas harus mempunyai laporan atas kegiatan perusahaan baik yang berhubungan dengan pihak internal perusahaan juga dengan masyarakat. Asas responsibilitas juga mewajibkan perusahaan harus melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud tidak hanya peraturan perusahaan, tetapi juga peraturan perundang-undangan negara dimana perusahaan tersebut berada. Asas-asas tersebut diharapkan dapat mendorong meningkatnya kinerja perusahaan tersebut.

Peningkatan kinerja perusahaan mutlak diperlukan sebagai salah satu dasar untuk menilai kualitas perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan

Governance (KNKG) prinsip dasar untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam penerapan GCG menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* adalah:

1. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
2. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
3. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.

Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan dituntut secara hukum untuk menerapkan prinsip GCG seperti yang tersirat dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) (2010) diantaranya: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan. Dijelaskan pada Pedoman Umum GCG Indonesia dalam Solihin (dikutip oleh Ramdhaningsih dan

Utama, 2013) khususnya prinsip responsibilitas, dimana pedoman tersebut dinyatakan bahwa perusahaan wajib mematuhi undang-undang dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga tercipta suatu *corporate citizenship*.

Sebagai salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar, *good corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap perusahaan dan iklim persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Penerapan GCG dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi perusahaan yang kompetitif sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.

Menurut Komite *Cadbury* dalam Surya dan Ivan (2006), *corporate governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaandengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. GCG merupakan suatu hal yang penting untuk mewujudkan peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap para pemegang saham (Nugroho, 2014). Proksi yang digunakan untuk mengukur GCG yaitu dewan direksi, dewan komisaris, dan ukuran komite audit (Setiawan, 2012).

Dewan direksi adalah pihak dalam suatu entitas perusahaan sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan perusahaan. Dewan Komisaris sebagai pengawas dalam suatu perusahaan sedangkan komisaris independen sebagai

kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan dari dewan komisaris. Peranan dewan komisaris dan komisaris independen sangat penting dan diperlukan komitmen penuh dari dua hal tersebut dalam menentukan keberhasilan implementasi GCG tersebut (Effendi, 2009:19). Sedangkan komite audit bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari rasio profitabilitas seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM). Penelitian ini mengkhususkan pada kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *Return on Equity* (ROE). Good corporate governance dapat mengurangi resiko yang mungkin akan dilakukan oleh dewan direksi dan komisaris dengan berbagai keputusan yang mementingkan kepentingan pribadi. Hubungan antara GCG dengan profitabilitas adalah melalui kinerja perusahaan yang semakin baik akan mencerminkan kesan yang baik pula terhadap investor. Sehingga perusahaan akan meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh profit yang tinggi pula.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu banyak yang menghubungkan *Good Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan dalam hal ini diukur dengan profitabilitas. Nurcahyani dkk (2011) menjelaskan bahwa pada hasil uji regresi terhadap ROE nilai F hitung sebesar 7.766 dengan nilai probabilitas sebesar 0.002. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan GCG yang diukur berdasarkan skor CGPI serta kepemilikan saham institusional secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur berdasarkan ROE.

Nugroho (2014) menyebutkan bahwa dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap ROE. Sedangkan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ROE. Perbedaan hasil penelitian tersebut menjadikan perlunya variabel GCG terhadap profitabilitas menarik untuk diteliti.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan-perusahaan peserta *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan proksi GCG yaitu dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit. Profitabilitas perusahaan diproksi menggunakan *Return On Equity* (ROE). Masih banyaknya perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah GCG berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Padahal seperti yang diketahui bahwa GCG merupakan salah satu strategi jangka panjang agar perusahaan tetap *survive*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh GCG terhadap profitabilitas perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Profitabilitas perusahaan bagi investor, pemegang saham (shareholders), dan para pemangku kepentingan (stakeholders) sering dijadikan dasar dalam menilai kualitas suatu perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja keuangan adalah *good corporate governance* (GCG).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan mengetahui pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap profitabilitas perusahaan. Variabel-variabel karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : profitabilitas yang diukur dengan ROE (*Return On Equity*) perusahaan, serta praktik *corporate governance* yang dilihat yakni: Ukuran Dewan komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan institusional. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai pengaruh GCG terhadap profitabilitas perusahaan sehingga dapat digunakan oleh para praktisi dalam menjalankan praktik bisnis sehari-hari.
2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan GCG sehingga dapat digunakan oleh para akademisi di bidang akuntansi, manajemen, dan bisnis dalam melakukan penelitian pada masa mendatang.
3. Mendorong perusahaan-perusahaan untuk menaruh perhatian serius serta aktif terlibat dalam praktik GCG sebagai usaha meningkatkan kinerja dan profitabilitas perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian mempunyai maksud untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terbagi dalam lima bab dalam yaitu bab pendahuluan, bab telaah pustaka, bab metodologi penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab penutup.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi hal-hal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab II Telaah pustaka, bab ini berisi telaah pustaka yang membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini, mencakup landasan teori sebagai kerangka acuan pembahasan masalah, *review* dari penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang akan diuji.

Bab III Metode penelitian, bab ini berisi variabel-variabel penelitian yang digunakan dan juga definisi operasional variabel yang merupakan deskripsi dari masing-masing variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang merupakan deskripsi model dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab ini merupakan deskripsi dari objek penelitian, hasil analisis data, serta interpretasi hasil analisis dikaitkan dengan teori yang berlaku.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil analisis data yang telah diperoleh, keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, serta saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil dari penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976). Teori keagenan merupakan sebuah teori yang membahas hubungan pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*). Teori keagenan ini menjelaskan hubungan kontraktual antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Pemilik perusahaan memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja.

Pemilik yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja. Manajer sebagai *agent* bertanggung jawab menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk menjalankan kegiatan operasi dan meningkatkan laba perusahaan. Sementara pihak *principal* melakukan kontrol terhadap kinerja manajer untuk memastikan operasional perusahaan dikelola dengan baik.

Eisenhard (dalam Arifin, 2005), membagi teori keagenan menjadi 3 (tiga) buah asumsi yaitu: asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menjelaskan bahwa

manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*) (Arifin, 2005). Asumsi keorganisasian menjelaskan konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara pemilik perusahaan dan manajemen. Asumsi tentang informasi adalah konsep yang menjelaskan bahwa informasi merupakan sebuah komoditi.

Informasi yang tidak seimbang dapat menyebabkan masalah bagi prinsipal dalam mengontrol dan memonitor kinerja agen. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan dua permasalahan yang muncul akibat asimetri informasi yaitu:

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas.

Asimetri yang terjadi antara prinsipal dengan agen akan membuka peluang bagi pihak agen untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Bukhori (2012) menjelaskan bahwa semakin tinggi asimetri informasi antara manajer dengan pemilik yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh manajemen akan memicu semakin tingginya biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada tiga jenis *agency cost* yaitu:

1. *Monitoring Cost*. Biaya ini dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor aktivitas agen dengan menetapkan insentif yang layak untuk mencegah penyimpangan aktivitas.
2. *Bonding Cost*. Biaya yang dikeluarkan prinsipal kepada agen untuk membelanjakan biaya sumber daya perubahan yang bertujuan untuk menjamin agar agen tidak akan bertindak merugikan prinsipal.
3. *Residual Loss*. Merupakan nilai uang yang setara dengan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen yang timbul dari biaya keagenan.

Posisi tawar antara prinsipal dengan agen membuat pengambilan keputusan pada perusahaan seringkali menghasilkan keputusan yang bertolak belakang. Prinsipal sebagai pemilik perusahaan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan perusahaan sedangkan agen selaku pelaksana operasional perusahaan menguasai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan.

Adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang namun saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu sama lain (Arifin, 2005).

Agen berperan sebagai penyedia informasi bagi prinsipal dalam pengambilan keputusan. Agen dapat melakukan upaya sistematis yang dapat menghambat prinsipal dalam pengambilan keputusan strategis melalui penyediaan informasi yang tidak transparan. Sedangkan prinsipal selaku pemilik modal bertindak semaunya ataupun sewenang-wenang karena ia merasa sebagai pihak

yang paling berkuasa dan penentu keputusan dengan wewenang yang tak terbatas. Perbedaan cara berpikir antara prinsipal dengan agen yang terjadi menyebabkan pertentangan yang semakin tajam sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan yang pada akhirnya merugikan semua pihak (Arifin, 2005).

Menurut Arifin (2005) dalam konsep *Agency Theory*, manajemen sebagai agen semestinya *on behalf of the best interest of the shareholders*, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen yang melakukan aktivitas operasi yang tidak menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi dapat mengganggu aktivitas perusahaan dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah disebut dengan *Agency Problem* yang salah satunya disebabkan oleh adanya *Asymmetric Information* (Arifin, 2005).

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* mengalami perubahan definisi selama beberapa dekade terakhir. Friedman (1962) mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa definisi *stakeholder* pada awalnya hanya mengacu pada pemilik perusahaan. Namun demikian Freeman (1983) memperluas definisi *stakeholder* dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang tidak menguntungkan bagi perusahaan.

Stakeholder pada dasarnya adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2000). Karena kemampuan *stakeholder* ini maka organisasi akan memilih *stakeholder* yang dianggap penting dan dapat menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya* (Ullman, 1985).

Menurut Ghozali dan Chariri (2000) teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain).

Menurut Budiarto (dalam Nugroho, 2014), untuk menunjukkan keselarasan hubungan ini, setiap perusahaan diharapkan memiliki perhatian dan tanggung jawab yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan kepentingan social. Menurut Gray, Kouhy dan Adams (dalam Ghazali dan Chariri, 2000), kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari aktivitas tersebut.

Menurut Rahardja,dkk (dalam Nugroho, 2014) perusahaan harus mempertanggungjawabkan kepada semua kelompok dalam komunitas dan masyarakat yang berkepentingan dengan bisnis sebab perusahaan mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya masyarakat mempengaruhi perusahaan. Meskipun *stakeholder theory* dapat memperluas perspektif pengelolaan perusahaan dan

mengenalkan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholdernya*, teori *stakeholder* belum mampu menjelaskan pengaruh masyarakat secara luas terhadap perusahaan.

Hubungan perusahaan dengan kelompok *stakeholder* seperti kreditor, investor, pemerintah, karyawan dan masyarakat sekitarnya menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan. Diperlukan keselarasan diantara kelompok–kelompok ini agar tercipta situasi yang harmonis antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya pada internal dan eksternal perusahaan. Peningkatan kinerja ini diharapkan akan meningkatkan profitabilitas laba perusahaan.

2.1.3 Good Corporate Governance (GCG)

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu perusahaan (Nugroho, 2014).

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan

kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders).

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaanyang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Terdapat lima asas *good corporate governance*, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3.1 Struktur *Corporate Governance*

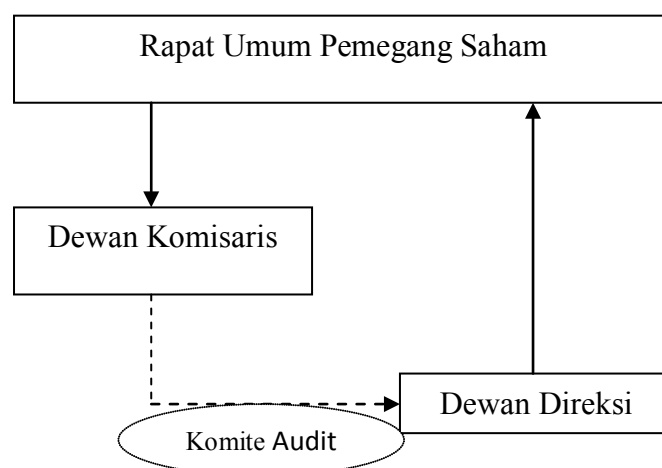
Struktur *governance*, dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip *governance* sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan serta dikendalikan (Arifin, 2005). Struktur *governance* diatur oleh Undang-undang sebagai dasar legalitas berdirinya sebuah entitas (Arifin, 2005). Salah satu model dalam struktur *governance* adalah model Anglo-Saxon. Struktur *governance* ini terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), *Board of Directors* (perwakilan dari para pemegang saham/pemilik), serta *Executive managers* (pihak manajemen sebagai pelaku aktivitas perusahaan).

Model Anglo-Saxon ini dikenal dengan *Single-board system* yaitu struktur tata kelola perusahaan yang tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Pada sistem ini anggota dewan komisaris juga merangkap anggota dewan direksi dan kedua dewan ini disebut sebagai *board of directors*.

Model *corporate governance* yang lain adalah *Continental Europe*. Dalam struktur ini *governance* terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direktur, dan Manajer Eksekutif (Arifin, 2005). Struktur ini sering disebut sebagai *Two-board system*, yaitu struktur CG yang memisahkan antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan.

Dalam model *two-board system*, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dapat mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris yang mewakili para pemegang saham untuk melakukan kontrol terhadap manajemen. Dewan komisaris sebagai atasan langsung dewan direksi mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dewan direksi serta melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan direksi dalam menjalankan perusahaan.

KNKG (2006) menyatakan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut *two-board system* dimana Dewan komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun, penerapan model *two-board system* di Indonesia berbeda dengan model *Continental Europe*, di mana kewenangan mengangkat dan memberhentikan Direksi berada di tangan RUPS. Hal ini membuat kedudukan Direksi sejajar dengan kedudukan Dewan komisaris.



Gambar 2.1 *Dual-Board System* yang berlaku di Indonesia

2.1.3.2 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang berdasarkan pada aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara para pelaku dalam suatu perusahaan ketika menjalankan peran dan tugasnya. Walsh dan Seward (dalam Arifin, 2005) menyatakan bahwa terdapat 2 mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan *GCG*, yaitu: (1) mekanisme pengendalian internal perusahaan, dan (2) mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar.

Struktur memiliki peran penting dalam implementasi mekanisme *Corporate Governance*. Struktur berperan sebagai kerangka dasar tempat diletakkannya sistem dalam penyusunan mekanisme *Corporate Governance* perusahaan. Struktur *Corporate Governance* merupakan kerangka dasar manajemen perusahaan dalam pendistribusian hak-hak dan tanggungjawab diantara organ-organ perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan RUPS /pemegang saham).

Arifin (2005) menjelaskan mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Sedangkan Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pihak diluar perusahaan misalnya pasar. Penelitian ini berfokus

pada struktur pengendalian internal perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi.

2.1.3.3 Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan perusahaan. Pengangkatan dan pemecatan dewan direksi, penentuan besar penghasilannya, serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ukuran dewan direksi dihitung berdasarkan jumlah anggota dewan direksi pada suatu perusahaan.

$$\text{Ukuran Dewan Direksi} = \text{Jumlah Anggota Dewan Direksi}$$

2.1.3.4 Ukuran Dewan Komisaris

KNKG (2006) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.

Pemahaman mengenai dewan komisaris juga dapat ditemui dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 108 ayat (5) yang menyebutkan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.

Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris bertujuan agar pihak manajemen dapat bekerja dengan baik.

Ukuran Dewan Komisaris = Jumlah Anggota Dewan Komisaris

2.1.3.5 Ukuran Komite Audit

Konsep Komite Audit pertama kali diperkenalkan oleh *New York Stock Exchange* (NYSE) pada tahun 1939 (Fulop, 2013). Pada awal tahun 1970-an Komisi Sekuritas di Amerika Serikat merekomendasikan perusahaan yang *listing* di bursa efek menyusun komite audit yang terdiri dari *non-executive directors* dan pada tahun 1979 NYSE menentukan persyaratan bahwa semua anggota komite audit haruslah dari kalangan independen (Fulop, 2013).

Dalam keputusan Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit terdiri dari sekurang – kurangnya satu komisaris independen yang bertindak sebagai ketua komite audit dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lain yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik (Nugroho, 2014). Menurut Vafeas (dalam Nugroho, 2014) menyatakan bahwa rata-rata jumlah komite audit yang ideal adalah 3-4 orang.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa:

1. laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
2. struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,
3. pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan

4. tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;

Dalam pedoman *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Ukuran Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kinerja suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sehingga dapat berpengaruh pada pembuatan keputusan investasi. Artinya, semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki investor perusahaan, maka akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Menurut Jati (dalam Widiyanto, 2011) tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan.

Salah satu rasio untuk menghitung profitabilitas adalah *return on equity* (ROE). *Return on Equity* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak dengan memanfaatkan total equity (modal sendiri) yang dimilikinya.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100 \%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk mengungkapkan pengaruh praktik GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Nugroho (2014) menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan karakteristik *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah CSR, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *return on equity* (ROE). Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan diperoleh 77 perusahaan yang memenuhi kriteria. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit suatu perusahaan, semakin tinggi kinerja

perusahaan. Sedangkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Jati (2009) menganalisis pengaruh dari struktur *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur *corporate governance*. Struktur *corporate governance* yang digunakan meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, ukuran dewan direksi, dan keberadaan komite audit. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang diukur adalah *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel struktur *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel struktur *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE.

Supatmi (2007) meneliti hubungan antara *corporate governance* dengan kinerja keuangan. Sampel penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang memperoleh peringkat baik dalam penerapan *corporate governance* menurut IICG dan yang dipublikasikan di Majalah SWA. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana mulai tahun 2001-2004. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu hanya perusahaan *non-financial* yang menerbitkan laporan keuangan sejak mendapat peringkat CGPI hingga dua tahun sesudahnya. Hasil uji regresi linear tentang pengaruh *corporate governance* terhadap empat rasio keuangan, yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage dan

aktivitas, menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan selama periode pengamatan tersebut.

Bukhori (2012) meneliti pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Variabel yang diuji adalah ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris sebagai mekanisme internal *corporate governance* dan ukuran perusahaan. Kinerja perusahaan diukur dengan *CFROA*. Pengumpulan data menggunakan metode *random sampling* terhadap perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sebanyak 160 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme internal *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Demikian pula ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, mekanisme internal *corporate governance* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Saraswati (2012) menguji kembali pengaruh *corporate governance* dengan *corporate social responsibility* dan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah nilai perusahaan sebagai variabel dependen, *Corporate social responsibility* (CSR) sebagai variabel independen, dan *corporate governance* sebagai variabel moderating. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel yang digunakan dipilih melalui metode *purposive sampling*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *corporate social*

responsibility (CSR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin's Q) namun dengan arah negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR yang lebih luas justru cenderung menurunkan nilai perusahaan.

Ramdhaningsih dan Utama (2013) menganalisis pengaruh indikator *good corporate governance* (GCG) dan profitabilitas pada pengungkapan *corporate social responsibility* CSR. Penelitian ini dikhususkan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 dengan 30 sampel penelitian yang diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*. Terkait dengan indikator *good corporate governance* tersebut, proksi yang digunakan antara lain: ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Sedangkan rasio profitabilitas menggunakan rasio *return on equity* (ROE). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR, sementara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR. Secara ringkas hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Metode	Variabel yang digunakan	Hasil penelitian
1.	Faizal Adi Nugroho (2014)	Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan	Uji beda t-test, uji signifikansi silmultan, uji koefisien determinasi, analisis regresi berganda	Variabel dependen: Kinerja Perusahaan (ROA) Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) (indikator kinerja ekonomi, indikator kinerja lingkungan; dan indikator kinerja sosial (tenaga kerja, hak asasi	Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit suatu perusahaan, semakin tinggi kinerja perusahaan. Sedangkan

				<p>manusia, sosial, dan tanggung jawab produk), Good Corporate Governance (GCG), Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit</p>	<p>ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.</p>
2.	<p>Emerald Dany Satria (2013)</p>	<p>Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan</p>	<p>Tobin's q dan Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>Variabel dependen: Kinerja Keuangan (ROA)</p> <p>Variabel independen: CSR (Dimensi Pegawai, Dimensi Masyarakat, Dimensi Produk, Dan Dimensi Lingkungan)</p>	<p>CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas jangka pendek perusahaan tetapi berpengaruh positif dan signifikan</p>

					<p>terhadap profitabilitas masa depan perusahaan. Pertumbuhan penjualan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas jangka pendek perusahaan; leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas jangka pendek perusahaan; dan ukuran</p>
--	--	--	--	--	--

					perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas masa depan perusahaan
3.	Supatmi (2007)	<i>Corporate Governance</i> Dan Kinerja Keuangan	Uji beda t- test, regresi linear, dan regresi logistik	Variabel dependen: Kinerja Keuangan, Profitabilitas (ROE) <i>Leverage</i> (<i>Leverage ratio</i>), Likuiditas (<i>Current ratio</i>) Aktivitas (<i>Total asset turnover</i>) Kebangkrutan Variabel independen:	Corporate governance terbukti secara statistik tidak berpengaruh terhadap rasio keuangan, yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage dan aktivitas. Perusahaan dengan

					<i>corporate governance</i> baik, tidak terancam kebangkrutan yang diproksi Dengan Altzman z-score.
4.	Iqbal Bukhori (2012)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan	Uji beda t-test, uji signifikansi silmultan, uji koefisien determinasi dan regresi linier berganda	Variabel dependen: kinerja keuangan <i>Cash Flow Return On Asset</i> (CFROA) Variabel independen: Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan.	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme internal <i>corporate governance</i> terhadap kinerja perusahaan. Demikian

					pula ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
5.	Rara Saraswati (2012)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Pada Hubungan <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei	Uji beda t-test, uji signifikansi silmultan, uji koefisien determinasi, dan analisis regresi	Variabel dependen: nilai perusahaan variabel independen: <i>Corporate social responsibility</i> (CSR) dan variabel moderating: <i>corporate governance</i> Variabel pemoderasi: Kepemilikan manajerial, MANJ,	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin's Q) namun dengan arah negatif

				Kepemilikan institusional (INST), Proporsi komisaris independen (INDEP), Jumlah anggota komite audit (KA)	
6.	Melinda Timea Fülöp (2013)	<i>Correlation Analysis Of The Audit Committee And Profitability Indicators</i>	Pendekatan Deduktif Kualitatif dan Kuantitatif	Variabel Dependen: Roa Variabel Independen: Jumlah Anggota Komite Audit, Anggota Independen Komite Audit.	Peran Komite Audit yang krusial dalam efektivitas dan efisiensi perusahaan.

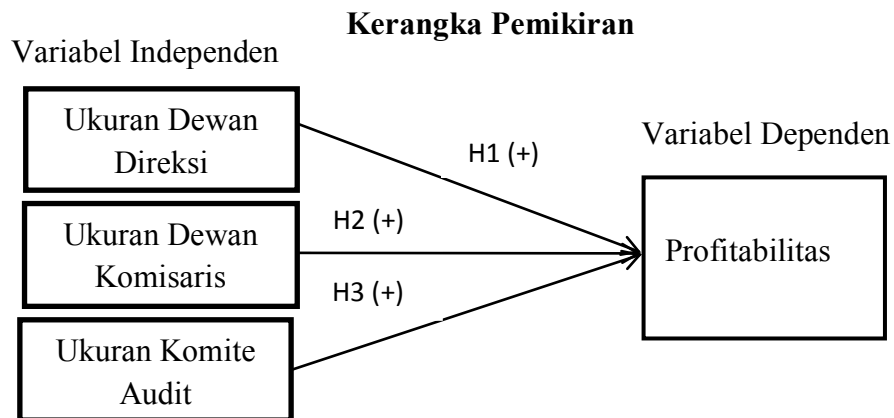
Sumber : diringkas untuk penelitian, 2014

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mencoba menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap profitabilitas perusahaan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah

diuraikan sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2



Sesuai dengan gambar di atas, maka dalam penelitian ini variabel independen *good corporate governance* akan diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen profitabilitas. Pada penelitian ini, *good corporate governance* dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.4. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Hubungan Ukuran Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Perusahaan

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-

masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (fiduciary responsibility). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Pemisahan peran dewan komisaris dengan dewan direksi membuat dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi bertugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat mewakili perusahaan dalam berbagai urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Jumlah dewan direksi secara logis akan berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Karena dengan adanya beberapa anggota dewan direksi, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara anggota dewan direksi dengan dewan komisaris.

Hardikasari (2011) menyebutkan bahwa banyak penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang lebih kecil. Beberapa penelitian yang membahas tentang hubungan ukuran jumlah dewan diantaranya adalah Jensen (1993), dan Yermack (1996). Namun demikian, Dalton *et al.* (dalam Hardikasari, 2011) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan.

Ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme *Corporate Governance* yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Namun, dengan adanya perbedaan temuan para peneliti dalam penelitian sebelumnya, maka bukti yang diperlukan masih diperdebatkan (Bukhori, 2012). Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti yang lebih komprehensif dalam melihat peran ukuran dewan direksi terhadap profitabilitas perusahaan.

H1 = *Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.*

2.4.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Penelitian Hardikasari (2011) menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Jensen (1993), menyebutkan bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris maka akan semakin sulit dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya, diantaranya kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris.

Menurut Bukhori (2012) dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian yang berikutnya adalah:

H2 = Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.

2.4.3 Hubungan Ukuran Komite Audit terhadap profitabilitas perusahaan.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki

otoritas langsung terhadap perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Karena itu, posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan.

Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyaidampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Peran komite audit yang sangat penting ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan peningkatan kinerja perusahaan maka diharapkan profitabilitas perusahaan dapat naik.

Menurut Familia (2010) komite audit memiliki hubungan yang positif terhadap profitabilitas perusahaan. Jadi setiap adanya peningkatan jumlah anggota komite audit maka akan diikuti dengan peningkatan pada profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian yang berikutnya adalah:

H3 = Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan , sedangkan variabel independennya adalah GCG yang diukur melalui ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan komite.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan. Besarnya profit perusahaan merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan pengukuran atas prestasi perusahaan yang timbul akibat proses pengambilan keputusan manajemen. Penelitian ini menggunakan ROE (*Return on Equity*) untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Hal ini dikarenakan apabila investor ingin melihat seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan *return* atas investasi yang mereka tanamkan. Pertama kali yang akan dilihat oleh *stakeholder* adalah rasio profitabilitas terutama ROE (*Return on Equity*). ROE (*Return on Equity*) menunjukkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan *return* bagi para investor. Dewi dan Widagdo (2012) menyebutkan bahwa ROE (*Return on Equity*) didapat dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dan total ekuitas, seperti pada rumus dibawah ini:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham khususnya dan *stakeholder* pada umumnya (Komite Cadbury dalam Dewi dan Widagdo, 2012). Pada penelitian ini, GCG diukur dari ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit.

3.1.2.1 Ukuran Dewan Direksi

Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan menjamin karena terciptanya hubungan dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediann sumber daya (Pearce & Zahra, 1992 dalam Faisal, 2005). Ukuran dewan direksi diukur melalui jumlah seluruh anggota dewan direksi pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.

$$\text{Ukuran Dewan Direksi} = \text{Jumlah Anggota Dewan Direksi}$$

3.1.2.2 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan perbandingan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Ukuran dewan komisaris diukur dengan membagi antara total anggota dewan komisaris dibandingkan dengan total

anggota dewan direksi di perusahaan. Rumus untuk menghitung ukuran dewan komisaris sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}$$

3.1.2.3 Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit merupakan salah satu karakteristik yang mendukung efektifitas kinerja komite audit dalam suatu perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit tentu akan lebih baik bagi perusahaan. Hal tersebut menunjukkan pengawasan yang lebih maksimal. Pada penelitian ini, ukuran komite audit diukur dengan membandingkan jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Rumus untuk menghitung ukuran Ukuran Komite Audit sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tahun 2012. CGPI adalah pemeringkatan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui riset yang dirancang untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *Corporate Governance* (CG) melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan patok banding (*benchmarking*) (IICG, 2012).

Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *purposive sampling*. Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* adalah pemilihan anggota sampel berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan data tentang *corporate governance* khususnya yang memuat informasi tentang ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit. Selain itu juga mempublikasikan data keuangan yang lengkap pada tahun 2012.
2. Perusahaan yang memiliki nilai ekuitas positif. Hal ini karena ROE (*Return on Equity*) sebagai proksi dari kinerja perusahaan yang menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas.
3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan menyediakan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini secara lengkap.

Tabel 3.1

Proses Pengambilan Sampel Penelitian

Kriteria	Total
Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan data tentang <i>Corporate Governance</i> (peserta CGPI) khususnya yang memuat informasi tentang ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit. Selain itu juga mempublikasikan data keuangan yang lengkap pada tahun 2012.	86
Perusahaan yang memiliki nilai ekuitas positif. Hal ini karena ROE (<i>Return on Equity</i>) sebagai proksi dari kinerja perusahaan yang	58

menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas.	
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan tidak menyediakan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini secara lengkap.	28
Jumlah Sampel Penelitian	58

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber diantaranya yaitu didapat melalui data CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) tahun 2012 yang diterbitkan oleh IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) dalam www.iicg.org dan laporan keuangan tahunan perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang didokumentasikan dalam www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Metode studi pustaka

Metode studi pustaka yaitu melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti buku-buku, jurnal, majalan dan sumber- sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data dengan cara mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2006).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan ada empat yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokolerasi dan uji heterokedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah yang terdistribusi normal. Ujnormalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Pengujian normalitas dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis:

H₀ : data residual berdistribusi normal

H_A : data residual tidak berdistribusi normal

Level signifikansi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 0,05. Data terdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) hasil perhitungan dalam komputer lebih besar dari 0,05.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2006). Multikolonearitas adalah situasi adanya variabel-variabel bebas diantara satu sama lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi, maka perlu dilihat beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 0,95), maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
3. Melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2006).

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini akan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yang mensyaratkan adanya

konstanta (intercept) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen (Ghozali, 2006).

Mekanisme pengujian Durbin Watson menurut Gujarati (2002) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis :

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

2. Menentukan nilai d hitung (Durbin-Watson).

3. Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel independen, menentukan nilai batas atas (d_u) dan batas bawah (d_l) dalam tabel.

4. Mengambil keputusan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika $0 < d < d_l$, H_0 ditolak berarti terdapat autokorelasi positif.

b. Jika $d_l \leq d \leq d_u$, daerah tanpa keputusan (gray area), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan.

c. Jika $d_u < d < 4 - d_u$, H_0 tidak ditolak berarti tidak ada autokorelasi.

d. Jika $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$, daerah tanpa keputusan (gray area), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan.

e. Jika $4 - d_l < d < 4$, H_0 ditolak berarti terdapat autokorelasi positif.

3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (homokedastisitas) dimana *variance* residual satu

pengamatan ke pengamatan lain tetap. Ada beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas dalam *variance error terms* untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (diagram scatterplot) dengan dasar analisis yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

(Ghozali, 2006)

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Guna melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis *multiple regression* (regresi berganda). Adapun persamaan multiple regression untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Model Regresi :

$$\text{ROE} = \alpha + \beta_1 \text{DD} + \beta_2 \text{DK} + \beta_3 \text{KA} + e$$

ROE : kinerja perusahaan *i* tahun ke-*t* yang diukur menggunakan

ROE

α : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi

DD : Ukuran Dewan Direksi perusahaan *i* tahun ke-*t*

DK : Ukuran Dewan Komisaris perusahaan i tahun ke-t
 KA : Ukuran Komite Audit perusahaan i tahun ke-t
 e : error

Setelah persamaan regresi terbebas dari asumsi klasik maka langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini meliputi:

3.5.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Langkah-langkah untuk pengujian tersebut yaitu:

1. Menetapkan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05
2. Menghitung nilai *sig-F* dengan menggunakan software SPSS 17
3. Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian yaitu bila nilai *sig-F* kurang dari tingkat signifikan 0,05 berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitupun jika nilai *sig-F* lebih dari 0,05 berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Langkah-langkah untuk pengujian tersebut yaitu:

1. Menetapkan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05
2. Menghitung nilai *sig-t* dengan menggunakan software SPSS 17

3. Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian yaitu bila nilai signifikan kurang dari tingkat signifikan 0,05 berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan bila nilai signifikansi lebih dari 0,05 variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model karena dalam penelitian ini menggunakan banyak variabel independen, maka nilai *Adjusted* R^2 lebih tepat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.